

## **BERHASIL TURUNKAN ANGKA STUNTING, PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DIGELONTOR INSENTIF FISKAL RP 18,4 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/08/Pembagian-paket-sembako-untuk-penanganan-stunting-di-boyolali-764247053.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARBOYOLALI.COM - Keberhasilan Pemkab Boyolali menurunkan angka stunting, mendapat apresiasi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Dari 8,2 persen turun menjadi 7,7 persen. Alhasil Pemkab mendapat dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan, senilai Rp 6,3 miliar untuk penanganan stunting. Sedangkan insentif fiskalnya total senilai Rp 18,4 miliar.

Bupati Boyolali M. Said Hidayat menjelaskan, Kota Susu menjadi salah satu kabupaten yang cukup baik dalam penanganan stunting. Insentif fiskal tersebut diterima saat rapat koordinasi nasional (rakornas) bersama wapres, dengan agenda utama penanganan stunting. "Pak wapres memberikan penghargaan dan apresiasi, kepada beberapa kabupaten dan pemerintah provinsi (pemprov). Termasuk Pemprov Jateng. Kabupaten Boyolali juga diundang, dan dinilai baik dalam penurunan stunting. Sehingga mendapat dana insentif fiskal daerah," ungkap Said, kemarin (8/10).

Insentif fiskal Rp 6,3 miliar itu, akan dialokasikan untuk penanganan stunting di Kota Susu. "Penurunan angka stunting memerlukan peran semua pihak. Sehingga percepatan dan penurunan stunting bisa berjalan dengan baik," imbuh Said.

Sekda Boyolali Masruri menambahkan, penyerahan dana insentif fiskal sesuai Pasal 13 Perkenkeu Nomor 97 Tahun 2023, tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu menganggarkan Rp 3 triliun

untuk empat kategori. Yakni kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, serta percepatan belanja daerah.

Sekda Boyolali Masruri menambahkan, penyerahan dana insentif fiskal sesuai Pasal 13 Permenkeu Nomor 97 Tahun 2023, tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu menganggarkan Rp 3 triliun untuk empat kategori. Yakni kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, serta percepatan belanja daerah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/843054774/berhasil-turunkan-angka-stunting-pemkab-boyolali-digelontor-insentif-fiskal-rp-184-miliar>, “Berhasil Turunkan Angka Stunting, Pemkab Boyolali Digelontor Insentif Fiskal Rp 18,4 Miliar”, tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/mantap-boyolali-dapat-insentif-rp184-miliar-dari-pusat-ini-peruntukannya-1761822>, “Mantap! Boyolali Dapat Insentif Rp18,4 Miliar dari Pusat, Ini Peruntukannya”, tanggal 8 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.<sup>1</sup>
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

<sup>2</sup> Ibid

- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.<sup>3</sup>
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.<sup>4</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
  1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
  2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
  3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid